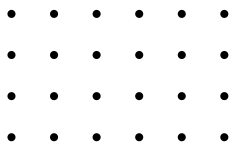


RENCANA AKSI KINERJA SASARAN

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, dapat tersusun tepat pada waktunya sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja disusun sebagai dasar untuk mengevaluasi sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Kinerja ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026.

Singaparna, Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI.....ii

BAB I PENDAHULUAN.....3

 1.1 Latar Belakang3

 1.2 Maksud dan Tujuan.....3

 1.3 Sistematika Penulisan4

BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....5

 2.1 Rencana Kerja (RENJA).....5

 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)5

 2.3 Perjanjian Kinerja.....8

BAB III RENCANA AKSI 10

BAB IV PENUTUP.....20

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu kewajiban yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif. Komponen perencanaan dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah menyusun Rencana Aksi Kinerja sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perjanjian Kinerja. Rencana aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2026 memiliki peran yang sangat penting sebagai panduan dalam melaksanakan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja tahun 2026.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai salah satu referensi sekaligus sebagai panduan untuk mengimplementasikan formulasi kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk program kerja. Sedangkan yang menjadi tujuan penyusunan dokumen rencana aksi kinerja sasaran BPKPD Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya sebagai berikut:

- a. Merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2026 secara berkala;

- b. Mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran startegis dan IKU dalam Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Mempermudah dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2026;
- d. Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menuju terwujudnya *good governance* dan transparan.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan doumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja	Menyajikan mengenai Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2026.
Bab III Rencana Aksi	Menyajikan Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026
Bab IV Penutup	Menyajikan penjelasan singkat mengenai peran penting penyusunan rencana aksi.

BAB II RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Kerja (RENJA)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan unsur penunjang pengelola keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2025-2029, Visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2025-2029 adalah “ **Tasikmalaya yang Religius/Islami, Maju, Adil dan Makmur**”.

Untuk mendukung visi tersebut maka ditetapkan 5 misi. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung misi ke-5 (lima) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis, Bersih, dan Akuntabel**. Misi ini mencerminkan komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, adil, partisipatif, dan bertanggung jawab kepada rakyat. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mempercepat pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan melalui sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Sedangkan untuk tujuan daerah mendukung Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Baik serta sasarannya mendukung Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan berintegritas dengan Indikator sasaran Persentase Capaian Reformasi Birokrasi General (RB General). Untuk pencapaian tujuan dan sasaran Daerah tersebut didukung oleh tujuan BPKPD yaitu Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima dengan indikator berupa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang akan digunakan untuk periode tahun 2025-2029 sesuai dengan periode Renstra yang telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 100.1.6/KEP.89/BPKPD/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja						Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja					
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	84,007	84,50	76,00	77,00	78,00	79,00	80,00	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
											Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		13,02	3	3	3	4	4	4

Sumber: Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	3%

Tabel 2.3

Program dan Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah yang Akuntabel, Efisien dan Efektif	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		32.990.110.350,00
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	172.000.000,00
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.114.441.709,00
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.251.997.280,00
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.461.850.000,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	989.821.361,00
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah		613.201.996.242,00
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.830.031.000,00
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	8.808.660.000,00
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	545.085.000,00
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	602.018.220.242,00
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.739.185.000,00
4.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	Persentase pertumbuhan PAD	3%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	7.741.195.300,00

Sumber: BPKPD 2026, diolah

BAB III RENCANA AKSI

Rencana Aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 yang dituangkan secara berkala. Adapun rencana aksi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang efektif, efisien, dan akuntabel	1	Hasil Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WT P	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Meningkatkan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		82,45	0	0	0	0	0	0	0	82,45	0	0	0	0	29.286.441.709,00	SEKRETARIAT
								Meningkatkan Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah		87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,25	0,00	3.703.668.641,00	SEKRETARIAT
							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	105	14	7	8	11	6	2	11	6	3	14	4	19	172.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat Daerah	Dokumen	29	9	4	3	0	3	0	1	4	1	4	0	0	102.000.000,00	SEKRETARIAT
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	76	5	3	5	11	3	2	10	2	2	10	4	19	70.000.000,00	SEKRETARIAT
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persen	100%	7,14%	7,14%	14,29%	7,14%	7,14%	14,29%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	7,14%	29.114.441.709,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	97	97	97	194	97	97	194	97	97	97	97	97	97	29.114.441.709,00	SEKRETARIAT
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Persen	100%	0,00%	11,11%	38,89%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	1.251.997.280,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	20.629.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.006.800,00	SEKRETARIAT

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Menyediakan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	30.017.448,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	0	0	1/4	75.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	56.000.000,00	SEKRETARIAT
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Melaksanakan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	160.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	4	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	291.937.032,00	SEKRETARIAT
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Melaksanakan penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.407.000,00	SEKRETARIAT
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Melaksanakan <i>update sistem</i> berbasis <i>paperless</i> dan penyimpanan dokumen berbasis <i>cloud</i>	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	70.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Melaksanakan pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	38,89 %	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	5,5 6%	1.461.850.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	730.650.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Menyediakan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000.000,00	SEKRETARIAT
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	651.200.000,00	SEKRETARIAT

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
				T W I	TW II	T W III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan pemeliharaan barang milik Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	100%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	69, 44 %	989.821.361,00	SEKRETARIAT	
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Melaksanakan pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	70	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	1/1 2	663.150.000,00	SEKRETARIAT	
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya	Unit	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	137.748.483,00	SEKRETARIAT	
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melaksanakan pemeliharaan gedung kantor	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	188.922.878,00	SEKRETARIAT	
								Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100%	12, 19 %	4,0 9%	4,0 9%	8,9 3%	4,0 9%	2,2 4%	7,6 8%	11, 33 %	6,4 1%	6,5 8%	5,8 0%	26, 58 %	613.201.996.242,00	
								Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persen	100%	14, 87 %	1,8 2%	1,8 2%	1,8 2%	1,8 2%	0,0 0%	0,0 0%	36, 36 %	0,0 0%	9,0 9%	14, 23 %	18, 18 %	1.830.031.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2027	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	59.520.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2026	Jumlah dokumen perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disusun	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	59.520.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Tahun 2027	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	56.084.000,00	BIDANG ANGGARAN
								Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Tahun 2026	Jumlah perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	Dokumen	59	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	56.084.000,00	BIDANG ANGGARAN

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB	
			T W I	TW II	T W III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2026	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokume n	59	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.100.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2026	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	Dokume n	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	53.274.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokume n	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	147.726.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokume n	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	147.726.000,00	BIDANG ANGGARAN	
							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokume n	5	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	439.030.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Melaksanakan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokume n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	443.771.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Penganggaran Daerah Kepada OPD, Kecamatan, dan BLUD	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah pemerintah Kabupaten/Kota	Orang	318	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	316.196.000,00	BIDANG ANGGARAN
							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaa n Daerah	Menyelenggarakan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persen	100%	10,42 %	4,17 %	4,17 %	10,42 %	4,17 %	4,17 %	22,92 %	4,17 %	4,17 %	10,42 %	4,17 %	16,67 %	8.808.660.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
							Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Melaksanakan pembayaran bunga pinjaman daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokume n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8.407.960.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
			T W I	TW II	T W III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Melaksanakan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokume n	236	59	0	0	59	0	0	59	0	0	59	0	0	47.607.900,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Melaksanakan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokume n	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	192.052.500,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
							Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Melaksanakan Koordinasi, Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Keuangan Bukan Bank	Dokume n	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	33.029.600,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN
							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Melaksanakan Kegiatan Rekonsiliasi Pajak dan Menyusun Laporan pph atas laporan penerimaan kas	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokume n	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	128.010.000,00	BIDANG PERBENDAHAR AAN	
							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Menyelenggara n Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koodinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persen	100%	20,71 %	7,58%	7,58%	20,71 %	7,58%	2,02%	5,02%	2,02%	18,69 %	4,04%	2,02%	2,02%	545.085.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Melaksanakan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Dokume n	16	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	93.703.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB	
				T W I	TW II	T W III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
								Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	17	2	1	1	2	1	1	3	1	1	2	1	1	95.796.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
								Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	Laporan	3	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	165.276.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	110.035.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	
								Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Orang	108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.021.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga	41	0	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.254.000,00	BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Menyelenggarakan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	2,7 8%	69, 44 %	602.018.220.242,00	BIDANG PERBENDAHARAAN	
								Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Melaksanakan Penyaluran Dana Desa, Alokasi dana Desa dan Bantuan Keuangan kepada	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	552.975.562.910,00	BIDANG PERBENDAHARAAN

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
			TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Pemerintah Desa																	
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	30.015.440.000,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Melaksanakan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19.027.217.332,00	BIDANG PERBENDAHARAAN
							Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	Persen	84,04%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	84,04%	1.739.185.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100%	1,67%	1,67%	11,67%	1,67%	1,67%	1,67%	31,67%	1,67%	1,67%	1,67%	1,67%	41,67%	1.739.185.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Penyusunan Standar Harga	Menyusun Standar Satuan Harga Barang Pemkab Tasikmalaya	Jumlah Standar Harga yang disusun	Dokumen	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	135.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemkab Tasikmalaya	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	75.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Menyusun Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD dan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan BMD	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Pengamanan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah yaitu: 1. Melaksanakan Pensertifikatan BMD sebanyak 600 sertifikat 2. Membuat 50 Plang BMD	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	900.000.000,00	BIDANG ASET DAERAH
							Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Melaksanakan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	329.185.000,00	BIDANG ASET DAERAH

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN	TARGET				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
				TW I	TW II	TW III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya	2	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	3,00%	-	-	-	3,00%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100%	3,18%	8,43%	5,21%	7,50%	2,50%	2,50%	12,50%	2,50%	17,50%	7,50%	2,50%	28,18%	7.741.195.300,00	
								Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Menyelenggarakan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persen	100%	3,18%	8,43%	5,21%	7,50%	2,50%	2,50%	12,50%	2,50%	17,50%	7,50%	2,50%	28,18%	7.741.195.300,00	
								Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Menyusun Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	76.748.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	157.614.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	
								Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Melaksanakan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	326.031.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Unit	59	4	35	16	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1.527.937.400,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
								Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melaksanakan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	Laporan	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3.148.535.000,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Melaksanakan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Layanan	1	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	1/12	756.089.100,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
								Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Melaksanakan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	53.155.000,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah
								Penagihan Pajak Daerah	Melaksanakan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Dokumen	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.039.562.300,00	Bidang Pelayanan Pajak Daerah

RENCANA AKSI BPKPD TAHUN 2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGE T KINERJ A SASAR AN	TARGET				PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	AKTIVITAS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KEGIATAN	TARGET BULAN KE-												ANGGARAN (Rp) TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
				T W I	TW II	T W III	TW IV						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
								Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Melaksanakan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Dokume n	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	313.589.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
								Elektornifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Melaksanakan High Meeting Level	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Dokume n	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	341.933.500,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
JUMLAH																								655.672.486.892,00		

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja Sasaran merupakan dokumen yang berisikan jadwal rencana pelaksanaan perjanjian kinerja yang menyangkut sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan dengan indikator dan target yang ditetapkan sesuai anggaran yang telah disetujui.

Rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2026 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026, serta sebagai tolok ukur dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat megantisipasi adanya permasalahan/faktor penghambat yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Singaparna, Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya


Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003